

# Sektor Pendidikan Korban Reformasi

Oleh HORAS DJULIUS

*If you plan a year plant a seed, If you plan ten years plant a tree, If you plan thousand years teach the peoples.*

**P**EPATAH Cina tersebut menggambarkan betapa pentingnya sektor pendidikan dalam masyarakat karena siapa yang dididik dan bagaimana pendidikan dijalankan saat ini akan menghasilkan buah hingga seratus tahun kemudian. Bila setengahnya saja dari angka itu kita ambil, yaitu lima puluh tahun, artinya proses pendidikan saat ini akan menghasilkan keturunan untuk masyarakat hingga dua generasi. Lalu bagaimana bila proses pendidikan kita tidak sejalan dengan cita-cita kita sebagai satu bangsa?

Dalam konteks pendidikan dasar dan menengah, kita merasa miris melihat praktik yang sering terjadi hingga menjadi fenomena di antaranya adalah sontek massal yang baru-baru ini mengemuka. Untuk pendidikan tinggi, kondisi ini tidak kalah menyedihkan, mahal biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri menjadi begitu menakutkan bagi banyak keluarga Indonesia. Setelah sekian belas tahun bangsa ini melakukan reformasi di berbagai bidang harusnya kita becermin, sudah

rotan bagi kinerja daerah. Sering kita membaca di media cetak betapa gerahnya wali kota/bupati bila di daerahnya terdapat sekolah-sekolah (SD hingga SMA) dengan tingkat kelulusan rendah. Menjadi hal yang biasa jika wali kota/bupati memanggil kepala Dinas Pendidikan untuk menjelaskan mengapa terjadi ketidakihtungan siswa di daerah mereka.

Di sinilah jebakan itu terjadi. Karena kinerja kepala daerah bidang pendidikan sering diidentikkan dengan tingkat kelulusan siswa, wali kota/bupati akan meneruskannya menjadi indikator kinerja kepala Dinas Pendidikan yang ia pilih. Bak bola salju, kepala Dinas Pendidikan meneruskannya menjadi indikator kinerja kepala sekolah, dan kepala sekolah meneruskannya menjadi indikator kinerja guru yang dipinpinnya.

Karena terjebak dalam aspek kuantitas, mudah ditebak terdapat indikasi menyontek massal, bocornya soal, jawaban yang direvisi secara bersamaan untuk saling mengamankan. Mengamankan posisi guru di mata kepala sekolah, mengamankan posisi kepala sekolah di mata kepala Dinas Pendidikan, dan mengamankan posisi kepala daerah dalam sorotan publik. Pengamanan ini relatif lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja daerah di bidang

perekonomian (indeks daya beli) maupun kesehatan.

Reformasi pendidikan, khususnya yang berdampak pada pendidikan tinggi dapat kita cermati dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan serta UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Akan tetapi, yang wajib disoroti adalah implemenasi dari aturan perundang-dengan itu semua terwujud dalam tingginya biaya pendidikan khususnya di perguruan tinggi "negeri". Memang ada kuota penerimaan 20 persen bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin, dan 80 persen (baca: sebagian besar) melalui proses seleksi dengan pembayaran yang jauh lebih tinggi. Akan tetapi, bukannya penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan kualitas prima dan biaya yang terjangkau adalah barang publik yang pengadaan-nya menjadi tugas negara?

Ingat bahwa mereka yang saat ini kuliah dengan pembiayaan tinggi tersebut tentu akan menjadi pemimpin dalam 25 tahun mendatang. Jadi jangan kaget kalau satu generasi ke depan, pemimpinnya akan semakin tidak peduli dengan isu kesenjangan pendidikan dan kemiskinan. Singkatnya, reformasi pendidikan (tinggi) memiliki eksek melebarkan kesenjangan terhadap akses pendidikan berkualitas prima, antara mere-

ka yang berpendapatan tinggi, menengah, dan rendah.

Kita berharap sistem pendidikan dapat berfungsi sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas. Bila harapan ini adalah ekuilibrium yang kita inginkan bersama, harus disadari sistem pendidikan kita saat ini justru akan membawa bangsa ini menjauhi titik keseimbangan itu.

Reformasi birokrasi yang mungkin tidak sengaja memiliki eksek terhadap pendidikan dasar dan menengah, hendaknya menjadi perhatian bagi seluruh elemen masyarakat yang sudah terjebak dengan (angka) statistik yang menyengangkan tetapi miskin makna. Begitu juga dengan reformasi pendidikan (tinggi) yang berpotensi menajutkan kita dari semangat memperkecil jurang akses terhadap pendidikan (serta jurang pendapatan masyarakat) hendaknya segera direformulasi. Mudah-mudahan pemimpin berikutnya bukan hanya menjadikan isu ini sebagai dagangan politik melainkan benar-benar mewujudkan reformasi pendidikan yang hakiki agar kita dapat kembali menuju ekuilibrium yang dicita-citakan.\*\*\*

Penulis, dosen tetap Fakultas Ekonomi Umpas.